



**Bimtek Peningkatan Maturitas
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada Setjen dan Badan
Keahlian DPR**

18 Desember 2017

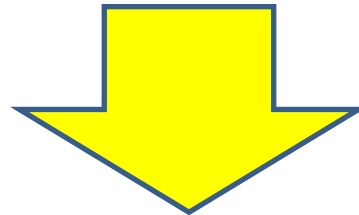
Tujuan Penugasan

- Observasi dan monitoring pemenuhan Rencana Tindak Perbaikan Maturitas SPIP
- Pemdampingan *Counterpart* untuk pemenuhan infrastruktur
- Peningkatan skor Maturitas SPIP

Jangka Waktu Pelaksanaan

- Dasar Penugasan: ST-195 /D2.02./2017 tanggal 23 November 2017
- Jangka Waktu Penugasan mulai 5 Desember 2017 s.d 22 Desember 2017.
- *Counterpart*: Satgas SPIP Setjen dan Badan Keahlian DPR.

**Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016**



tingkat maturitas penyelenggaraan
SPIP berada pada tingkat
“**Berkembang**” atau **tingkat 2** dari 5
tingkat maturitas SPIP

KARAKTERISTIK TINGKAT MATURITAS SPIP

Tingkat	Karakteristik SPIP
Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan Terukur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Hasil Penilaian Terhadap Penyelenggaraan SPIP

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
1.	Unsur Lingkungan Pengendalian	30	2,5	0,750
2.	Penilaian Risiko	20	1	0,200
3.	Unsur Kegiatan Pengendalian	25	2,273	0,568
4.	Unsur Informasi dan Komunikasi	10	2	0,200
5.	Unsur Pemantauan	15	2	0,300
Jumlah Skor		100		2,018

Karakteristik SPIP Di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI

1. Penegakan integritas dan etika perlu didukung dengan keberadaan kode etik yang memadai dan pengawasan menyeluruh atas pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menghindari terjadinya *FRAUD* dengan memperkuat peran APIP.
2. Kepemimpinan yang kondusif perlu dibuktikan dengan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM yang meliputi antara lain pola karir untuk seluruh pegawai, analisis jabatan dan beban kerja serta standar kompetensi untuk seluruh jabatan sehingga penempatan SDM sesuai standar kompetensi dan mengikuti pola karir yang ditetapkan
3. Identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi belum dilakukan dan terdokumentasi dengan baik
4. Laporan kinerja belum disusun melalui suatu sistem pengumpulan informasi kinerja yang sistematis dan terkordinasi dengan baik antar bagian dan unit kerja

Karakteristik SPIP Di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI

5. Pengendalian fisik atas aset belum didukung SOP yang memadai baik untuk aset bergerak seperti perangkat komputer penunjang pengelolaan sistem informasi maupun aset tidak bergerak.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan setiap tahun belum melalui proses reviu dan evaluasi yang memadai.

7. Otorisasi transaksi untuk kejadian penting yang bersifat khusus seperti hal-hal yang terkait percepatan penyerapan anggaran dan transaksi atau kegiatan pada akhir tahun anggaran belum dibuatkan aturan khususny/kebijakan atau SOPnya.

8. Kebijakan mengenai pembatasan akses atas sumber daya dan catatan belum dilakukan reviu berkala.

9. Akuntabilitas pencatatan atas sumber daya perlu didukung dengan *stock opname* fisik terhadap persediaan, inventarisasi aset dan pemberian label atas aset serta *updating* Daftar/Kartu Inventaris Ruangan secara periodik

Karakteristik SPIP Di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI

10. Pelaksanaan pengendalian intern yang memadai terhadap suatu transaksi dan kejadian penting (khusus) perlu didukung kebijakan yang menjelaskan definisi, jenis-jenis kejadian penting dan pengelolaannya

11. Belum semua satker melaporkan penyelenggaraan SPIP, pemantauan dan tindak lanjut Rencana Aksi secara rutin kepada Setjen Informasi penting terkait faktor-faktor keberhasilan yang kritis/ penting.

12. Dokumentasi atas kegiatan komunikasi belum memadai, yaitu belum seluruh kegiatan komunikasi rapat internal diterbitkan notulennya dan diadministrasikan dengan baik untuk kemudian disampaikan kepada peserta rapat.

13. Manajemen belum melakukan identifikasi dan pemantauan berkelanjutan atas kelemahan yang ada dalam pengendalian intern

14. Belum disusun pedoman evaluasi terpisah atas penerapan sistem pengendalian intern (SPI) oleh rekan sejawat (tim khusus evaluasi) atau APIP belum ada.

Sub unsur SPIP yang masih perlu dilakukan perbaikan yaitu:



1. Penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, dan perwujudan peran APIP yang efektif pada unsur lingkungan pengendalian.
2. Identifikasi risiko dan analisis risiko, pada unsur penilaian risiko pada usur penilaian risiko.

Sub unsur SPIP yang masih perlu dilakukan perbaikan yaitu:



3. Reviu Kinerja, Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian Fisik atas Aset, Penetapan dan Reviu Indikator, Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting, Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan, Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya, Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting pada unsur Kegiatan Pengendalian.
4. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif pada unsur informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah pada unsur pemantauan pengendalian intern.

Saran Peningkatan Maturitas SPIP

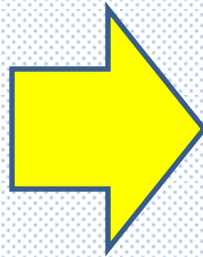
Lingkungan
Pengendalian



1. Menyusun kode etik khususnya untuk staf ahli Dewan
2. Melengkapi standar analisis jabatan dan beban kerja, standar kompetensi dan pola karir untuk SDM dalam lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Meningkatkan kapabilitas dan peran APIP, dengan menyusun pedoman atau petunjuk teknis pada setiap penugasan, meningkatkan kapasitas SDM auditor melalui diklat-diklat teknis pengawasan intern

Saran Peningkatan Maturitas SPIP

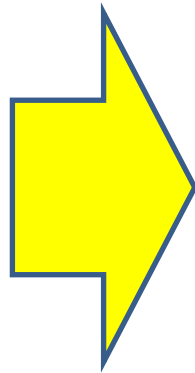
Penilaian
Resiko



Membuat aturan/kebijakan internal terkait penilaian risiko, melakukan identifikasi dan penilaian risiko, mendokumentasikan hasil penilaian risiko dan daftar risiko yang dibuat.

Saran Peningkatan Maturitas SPIP

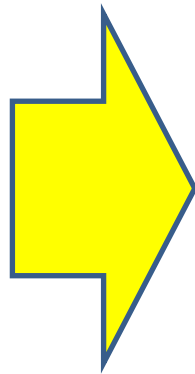
Kegiatan Pengendalian



1. Membangun sistem pengumpulan informasi kinerja yang mampu menyajikan data secara *uptodate*, terverifikasi antar unit kerja dan dapat diperbandingkan antar tahun. Melakukan reviu dan evaluasi berkala atas Indikator Kinerja Utama.
2. Menyusun SOP atas pengendalian fisik atas aset yang memadai baik untuk aset bergerak dan tidak bergerak.
3. Melakukan reviu dan evaluasi berkala atas Indikator Kinerja Utama.
4. Menyusun aturan khusus/kebijakan, pedoman atau SOP terkait dengan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dalam kondisi tertentu diluar rutinitas normal.

Saran Peningkatan Maturitas SPIP

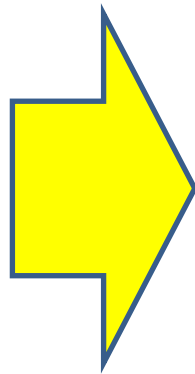
Kegiatan Pengendalian



5. Membangun sistem pengumpulan informasi kinerja yang mampu menyajikan data secara *uptodate*, terverifikasi antar unit kerja dan dapat diperbandingkan antar tahun. Melakukan reviu dan evaluasi berkala atas Indikator Kinerja Utama.
6. Menyusun SOP atas pengendalian fisik atas aset yang memadai baik untuk aset bergerak dan tidak bergerak.
7. Melakukan evaluasi atas kecukupan prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan serta mendokumentasikan hasilnya.

Saran Peningkatan Maturitas SPIP

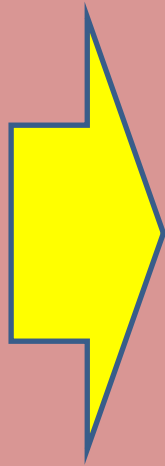
Kegiatan
Pengendalian



8. Mendokumentasikan setiap langkah upaya perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Setjen DPR RI
9. Mendokumentasikan perbaikan kebijakan, pedoman akuntansi dan pedoman lainnya terkait transaksi dan kejadian penting.

Saran Peningkatan Maturitas SPIP

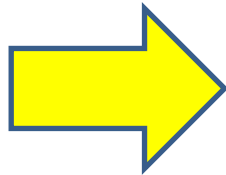
Informasi dan Komunikasi



1. Mengidentifikasi dan menentukan titik kritis yang mempengaruhi pencapaian kinerja/target IKU
2. Menetapkan saluran informasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal
3. Memberikan jaminan kepada pegawai bahwa tidak akan ada tindakan 'balas dendam' jika melaporkan informasi negatif, perilaku yang tidak benar atau penyimpangan.

Saran Peningkatan Maturitas SPIP

Pemantauan



- a. Melakukan pemantauan berkelanjutan dan identifikasi kelemahan penerapan pengendalian intern yang sudah ada yaitu atas kebijakan, pedoman atau SOP yang sudah disusun dan dilaksanakan.
- b. APIP menyusun pedoman evaluasi atas penerapan sistem pengendalian intern pada sebagai dasar pelaksanaan evaluasi terpisah.

Terima Kasih